

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Outcome

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas	199.106	73,16%	Dinas Pendidikan & Dinas DPPKBKPS	
				Jumlah anak usia 16 - 18 tahun di Provinsi Sumatera Barat	272.140			x 100 %
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di jenjang pendidikan khusus	6.851	52,87%		Dinas Pendidikan & Dinas Sosial
				Jumlah anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sumatera Barat	12.958			
2	Kesehatan	3	Rasio daya tampung rumah sakit	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi Sumatera Barat	5.302	0,10%	Dinas Kesehatan & Dinas DPPKBKPS	
				Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat	5.580.007			x 100 %
		4	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi	4	100%	Dinas Kesehatan & RSAM, RSUD Pariaman, RSUD M. Naatsir, RSJ HB. Saanin	
				Jumlah RS rujukan provinsi	4			x 100 %
		5	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan	337.148	100%		
				Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam kurun waktu satu tahun yang sama	337.148			x 100 %
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	57.523	100%				
		Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	57.523		x 100 %			
3	PU dan PR	7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	2,709	0,107%	Dinas PSDA	
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	2525,2			x 100 %
		8	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi	1,137	0,188%	Dinas PSDA	
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan provinsi yang rawan abrasi, erosi, dan akresi	604,8			x 100 %

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
		9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	231	x 100 %	0,355%	Dinas PSDA
				Luas daerah irigasi kewenangan provinsi	65.007			
		10	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	0	x 100 %	-	Dinas PU dan PR
				Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan.	0			
		11	Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	Total volume Limbah Domestik yang masuk dalam SPALD regional	0	x 100 %	-	Dinas PU dan PR dan Dinas LH
				Total kapasitas pengelolaan lmbah domestik oleh SPALD regional	0			
12	Rasio kemandapan jalan provinsi	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	1127,359	x 100 %	73,92%	Dinas PU dan PR		
		Panjang seluruh jalan provinsi	1525,2					
13	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	6944	x 100 %	34,72%	Dinas PU dan PR		
		Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	20000					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	0	x 100 %	-	Dinas Perkimtan dan BPBD
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020	0			
		15	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0	x 100 %	-	Dinas Perkimtan
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1			
		16	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	25,29	x 100 %	2,02%	Dinas Perkimtan
Luas kawasan kumuh 10-15 Ha	1254,94							
17	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU		x 100 %	... %	Dinas Perkimtan		
		Jumlah satuan perumahan						

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan		Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
5	Trantibum dan Linmas	18	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	7	x 100 %	77,78%	Satpol PP
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	9			
		19	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan	9	x 100 %	75,00%	Satpol PP
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada Pergub yang memuat sanksi	12			
		20	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun	-	x 100 %	0%	BPBD
				Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	1			
		21	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana	19	x 100 %	100%	BPBD
				Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi	19			
		22	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	19	x 100 %	100%	BPBD
				Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	19			
6	Sosial	23	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	150	x 100 %	100%	Dinas Sosial
				Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	150			
		24	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	235	x 100 %	100%	Dinas Sosial
				Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	235			
		25	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	180	x 100 %	100%	Dinas Sosial
				Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	180			
		26	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	x 100 %	0%	Dinas Sosial
				Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	0			
		27	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	26.620	x 100 %	100%	Dinas Sosial
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	26.620			

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Pelayanan Dasar								
7	Tenaga Kerja	28	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	19	x 100 %	100%	Dinas Nakertrans
				Jumlah Kabupaten/Kota	19			
		29	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	11.576	x 100 %	0,45%	Dinas Nakertrans
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	2.581.520			
		30	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	172.230.500.990	x 100 %	6671670%	Dinas Nakertrans
				Jumlah tenaga kerja	2.581.520			
		31	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10.395	x 100 %	125,24%	Dinas Nakertrans
Jumlah Perusahaan	8.300							
32	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	4.091	x 100 %	20,10%	Dinas Nakertrans		
		Jumlah pencaker yang terdaftar	20.357					
33	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun 2020	212	x 100 %	5,57%	Dinas Nakertrans		
		Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2020	3.809					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	87.723.749.811	x 100 %	4,00%	Dinas PP dan PA
				Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi	2.195.336.296.477			
		35	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi	306	x 100 %	0,01%	Dinas PP dan PA
Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	2.088.556							
36	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	151	x 100 %	0,01%	Dinas PP dan PA		
		Jumlah penduduk perempuan	1.704.917					
9	Pangan	37	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan provinsi	506.660	x 100 %	92,56%	Dinas Pangan
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi	547.384			
10	Pertanahan	38	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi		x 100 %	... %	Dinas Perkimtan
				Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi				
		39	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu	339,54	x 100 %	... %	Dinas Perkimtan
				Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	339,54			
40	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota		x 100 %	... %	Dinas Perkimtan		
		Luas izin lokasi yang diterbitkan						

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
11	Lingkungan Hidup	41	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IndeksKualitas Air (IKA) IndeksKualitas Udara (IKU) IndeksTutupan Lahan (ITL)	75,00 90,39 66,31	79,33%	Dinas LH	
		42	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	1 4	x 100 % 25%	Dinas LH	
12	Admindak dan Capil	43	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	Jumlah penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun 2 kali	2 2	x 100 % 100%	DPPKBKPS	
		44	Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Jumlah OPD provinsi	12 42	x 100 % 29%	Dinas PPKBKPS	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	50	x 100 % 43,48%	Dinas PMD	
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2020)	115			
		46	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	3	x 100 % 0,61%	Dinas PMD	
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2020)	493			
14	Pengendalian Penduduk dan KB	47	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,75%	Dinas PPKBKPS	
		48	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	674.297	x 100 % 71,48%	Dinas PPKBKPS	
				Jumlas Pasangan Usia Subur	943.299			
49	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani Jumlas Pasangan Usia Subur	124.660 943.299	x 100 % 13,22%	Dinas PPKBKPS			
15	Perhubungan	50	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut). o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)		72,40%	Dinas Perhubungan	
		51	Kinerja lalu lintas provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi	1349,46 2870,12	x 100 % 47%	Dinas Perhubungan	

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
16	Kominfo	52	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD	$\frac{50}{50} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfo
		53	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik	$\frac{15}{15} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfo
		54	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Jumlah penduduk	$\frac{5.498.751}{5.534.472} \times 100\%$	99,35%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	55	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha Jumlah seluruh koperasi	$\frac{149}{948} \times 100\%$	15,72%	Dinas Koperasi dan UKM
		56	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	$\frac{1.004}{53.431} \times 100\%$	1,88%	Dinas Koperasi dan UKM
18	Penanaman Modal	57	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019) di provinsi Jumlah investasi tahun 2019	$\frac{-468.688.240.000}{5.383.354.300.000} \times 100\%$	-8,71%	Dinas PMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	58	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	$\frac{423}{1.335.120} \times 100\%$	0,03%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		59	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	$\frac{580}{1.335.120} \times 100\%$	0,04%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		60	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (tahun 2020 - tahun 2019) Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2019	$\frac{(222-111)}{111} \times 100\%$	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	61	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah jumlah OPD	$\frac{25}{50} \times 100\%$	50%	Dinas Kominfo
		62	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah jumlah OPD	$\frac{25}{50} \times 100\%$	50%	Dinas Kominfo
21	Persandian	63	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian	$\frac{44}{504} \times 100\%$	8,73%	Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	64	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	$\frac{6}{6} \times 100\%$	100%	Dinas Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
23	Perpustakaan	65	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				Dinas Arsip dan Perpustakaan
		66	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				Dinas Arsip dan Perpustakaan
24	Kearsipan	67	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		70,58	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		68	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		76,66%	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket		
C. Urusan Pemerintahan Pilihan									
25	Kelautan Perikanan	69	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	464080,15 Ton				
		70	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP	542 610 x 100 %	88,85%			
26	Pariwisata	71	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2020 – Jumlah wisatawan tahun 2019)	-50257	x 100 %	-82,21%	Dinas Pariwisata	
				Jumlah wisatawan tahun 2019	61131				
		72	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(Jumlah wisatawan tahun 2020 – Jumlah wisatawan tahun 2019)	-349.936	x 100 %	-4,28%	Dinas Pariwisata	
				Jumlah wisatawan tahun 2019	8169147				
73	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	1477	x 100 %	30,72%	Dinas Pariwisata			
Jumlah kamar yang tersedia	4808								
74	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata		x 100 %	... %	Dinas Pariwisata			
27	Pertanian	75	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	40.865.959,00	x 100 %	57,93	Dinas Pertahorbun	
				Luas panen	705.410,40				
		76	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2019 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2018	232	x 100 %	191,74%	Dinas Peternakan dan Keswan	
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2018	121				
28	Kehutanan	77	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal	17	x 100 %	10,56%	Dinas Kehutanan	
				jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	161				
		78	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak	11.764	x 100 %	0,63%	Dinas Kehutanan	
Jumlah hutan keseluruhan	1.870.984								
79	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)	1.340	x 100 %	0,21%	Dinas Kehutanan			
Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)	630.695								
29	ESDM	80	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	73	x 100 %	26,45%	Dinas ESDM	
				jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	276				
81	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah Nagari yang teraliri listrik	1157	x 100 %	99,91%	Dinas ESDM			
			Jumlah Nagari					1158	

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
30	Perdagangan	82	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan} - \text{nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100 \%$	193	14,40%	Dinas Perindag
				1.339			
		83	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	102	91,07%	Dinas Perindag
				Jumah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan	112		
		84	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan	19	22,35%	Dinas Perindag
				Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun	85		
		85	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB	-	0,00%	Dinas Perindag
				Jumlah pelaku usaha MB TBB	-		
86	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	163,461	28,09%	Dinas Perindag		
		RDKK	581,945				
87	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	264	82,50%	Dinas Perindag		
		Jumlah barang beredar yang diawasi	320				
88	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{Sn}{p} \times 100 \%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember		7,85%	Dinas Perindag		
31	Perindustrian	89	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	$\frac{\text{(Jumlah Industri besar tahun 2020 - Jumlah industri besar tahun 2019)}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100 \%$	1	1,35%	Dinas Perindag
					74		
		90	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	28	28	Dinas Perindag
		91	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	28	37,84%	Dinas Perindag
				Jumlah izin yang dikeluarkan	74		
		92	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	100,00%	Dinas Perindag
Jumlah izin yang dikeluarkan	1						
93	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	-	0,00%	Dinas Perindag		
		Jumlah izin yang dikeluarkan	-				
94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan		90%			

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Perencanaan dan Keuangan	95	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD	$\frac{551.830.604.396}{6.445.606.788.337,93} \times 100 \%$	8,56%	Bakeuda
		96	Rasio PAD	Jumlah PAD	$\frac{2.255.072.985.427}{235.846.019.610.000} \times 100 \%$	0,96%	Bakeuda
				Jumlah PDRB non migas			
		97	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	$\frac{1.628.129.039.898,37}{6.413.199.788.337,93} \times 100 \%$	25,39%	Bakeuda
				jumlah belanja APBD			
		98	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	8 WTP	8 WTP	Inspektorat
99	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	level 3	Inspektorat		
		100	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	level 3	Inspektorat
2	Pengadaan	101	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2020	$\frac{2}{170} \times 100 \%$	1,18%	Biro AP2BMD
				jumlah kontrak keseluruhan tahun 2020			
		102	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{223}{1.867} \times 100 \%$	11,94%	Biro AP2BMD
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif			
103	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan Total belanja langsung	$\frac{798.946.057.241}{1.995.325.956.303} \times 100 \%$	40,04%	Bakeuda		
3	Kepegawaian	104	Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah PNS yang berpendidikan PT ke atas	$\frac{4.500}{2.303} \times 100 \%$	195,40%	BKD
				Jumlah PNS yang berpendidikan menengah/dasar			
		105	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{665}{6.803} \times 100 \%$	9,78%	BKD
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
		106	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{398}{665} \times 100 \%$	59,85%	BKD
				Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
4	Manajemen Keuangan	107	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu	$\frac{6.413.199.788.338}{7.271.605.742.777} \times 100 \%$	88,20%	Bakeuda
		108	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	$\frac{2.255.072.985.427}{\dots} \times 100 \%$	89,19%	Bakeuda

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
			APBD	Dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	2.528.472.797.867 x 100 %	93,13%	Bakeuda	
		109	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);		Ya, Tidak, Tidak, Tidak	Biro AP2BMD	
		110	Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	256.028.624.206	3,91%	Bakeuda	
			Total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	6.551.278.880.635	x 100 %			
5	Transparansi	111	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	724.178.648.178,54	90,67%	Bakeuda	
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses oleh publik	798.713.325.445,00	x 100 %			
		112	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	12	100%	Bakeuda	
			total jumlah dokumen yang telah dirinci	12	x 100 %			